

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN PELARIAN KORUPTOR
INDONESIA DI SINGAPURA**

ARTIKEL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

I MADE REGIANANDYA MAHAYASA

NIM. 0810113221



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN PELARIAN KORUPTOR
INDONESIA DI SINGAPURA**

Oleh :

**I MADE REGIANANDYA MAHAYASA
NIM. 0810113221**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Setyo Widagdo, SH, MH
NIP. 19590320 198601 1 003

Ikaningtyas, SH, LLM
NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH, M.Hum
NIP. 19561207 198601 1 001

**PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN PELARIAN TERSANGKA
KORUPSI INDONESIA DI SINGAPURA**

**I MADE REGIANANDYA MAHAYASA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Regianandya_m@yahoo.com

RINGKASAN

Banyaknya koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura dikarenakan belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Singapura menjadi tempat tujuan pelarian bagi para koruptor dikarenakan keadaan geografis yang sangat dekat. Dari 45 koruptor yang melarikan diri keluar negeri, ada 26 koruptor yang memilih untuk melarikan diri ke Singapura.

Kata kunci : koruptor, perjanjian ekstradisi, melarikan diri ke Singapura

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perbuatan korupsi merupakan permasalahan universal dalam tatanan politik semua Negara di dunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak, dapat mengurangi volumenya. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Dalam konteks internasional, untuk melawan tindakan korupsi tersebut, sebagian mayoritas negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa konvensi Internasional anti korupsi, seperti Konvensi PBB Anti Korupsi, yang kemudian disebut UNCAC (*United Nation Convention*

against Corruption) dan akhirnya diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006¹ oleh Indonesia dan G-20 (*Working Group on Anti Corruption – WGAC*).

Selain meratifikasi UNCAC, Indonesia, mempunyai cara lain untuk menanggulangi para pelaku korupsi, yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan juga dengan menggunakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Pembentukan KPK dimaksudkan untuk memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidak berdayaan sistem peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003. Sementara ekstradisi adalah sebuah sarana yang dapat digunakan oleh Indonesia sebagai alat untuk menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu. Akan sangat tidak adil bagi pihak korban apabila pelaku yang melarikan diri tersebut tidak dapat diadili.

Ekstradisi sendiri sangat terkait dengan kedaulatan dan yuridiksi dari suatu Negara. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan korupsi tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh secara legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu. Apabila suatu negara melindungi pelaku kejahatan korupsi yang memang sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi, secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan tersebut², sama seperti Singapura yang menjadi tempat penampungan para pelaku korupsi yang berasal dari Indonesia karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

¹Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

²Kucinx, **Skripsi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**, <http://contohmakalah-contohskripsi.blogspot.com/2011/02/skripsi-perjanjian-ekstradisi-dalam.html>, diakses pada tanggal 1 April 2012

Sampai saat ini, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, lima negara sudah meratifikasi perjanjian tersebut, yaitu dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, dan Hong Kong. Sementara Korea Selatan dan Singapura sampai saat ini, masih belum juga meratifikasi perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.

Faktor pendorong terbesar, mengapa banyak koruptor yang memilih Singapura untuk melarikan diri ialah, letak geografisnya yang sangat dekat, antara Indonesia dan Singapura, dan juga belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Dengan demikian, para pelaku kejahatan, terutama pelaku koruptor dapat dengan gampang menghilang dari tangan hukum Indonesia dan bersembunyi di negara Singapura tersebut. Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia menyebabkan pihak kepolisian Indonesia tidak bisa meminta bantuan kepada negara Singapura untuk menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pihak kepolisian di Indonesia harus menyelidiki sendiri keberadaan para pelaku kejahatan tersebut, dan harus dibawa pulang ke Indonesia untuk diadili.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme Pengembalian Tersangka Korupsi Indonesia Yang Melarikan Diri Ke Singapura Selain Menggunakan Perjanjian Ekstradisi?
2. Apakah kendala yuridis yang dialami Indonesia dalam mewujudkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif di Bidang *perjanjian extradisi*, yaitu mencari dan mengkaji norma-norma hukum, baik yang ada dalam undang-undang maupun keputusan-keputusan pengadilan, tentang kendala kendala yuridis yang dihadapi oleh Indonesia dalam Pengembalian Pelaku Korupsi yang melarikan diri ke Singapura dan juga bagaimanakah mekanisme yang seharusnya

digunakan oleh Indonesia untuk dapat mengembalikan pelaku korupsi tersebut.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan “*statuta approach*”,³ yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum di bidang hukum Perjanjian Internasional, selain itu, penulis juga menggunakan metode pendekatan “*case Approach*”, yaitu sebuah metode penelitian untuk menganalisa kasus kasus sebelumnya sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang ada.

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode, *Library Research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.

Dalam proses penulisan, penulis menggunakan beberapa metode pengolahan data dan analisis data:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna memperoleh suatu kesimpulan yang jelas terhadap kajian ini.

³Peter Mahmud Marzuki, , **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta 2005 hlm 93

PEMBAHASAN

Perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*), sebagai salah satu mekanisme pengembalian koruptor Indonesia di Singapura

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta⁴. *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana⁵.

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan *immobilization* dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.

Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia

⁴ Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Rineka Cipta, Jakarta 2009, hlm. 133.

⁵ Mekar simurat, “**Perbandingan Ekstradisi dan MLA**”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 26 July 2012.

memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.⁶

Bentuk-bentuk dari bantuan dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang; .
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau;
- k. bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

***Disguished Extradition* atau Extradisi Terselubung**

Dalam hukum internasional dikenal beberapa cara untuk mengeluarkan orang asing atau orang pelarian dari wilayah negara tempatnya berada, seperti pengusiran atau pembuangan (*expulsion* atau *deportation*) dan *persona non grata*. Cara mengeluarkan orang asing seperti tersebut bukanlah merupakan tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh negara terhadap orang asing yang berada dalam

⁶ Mekar simurat, “**Perbandingan Ekstradisi dan MLA**”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 26 july 2012.

wilayahnya. Di samping itu ada satu cara lain yang sebenarnya merupakan pelanggaran hukum internasional, yaitu penculikan (*abduction*)⁷.

1) Deportasi

Deportasi adalah penyerahan secara sepihak oleh suatu negara terhadap orang asing, yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh negara yang mendeportasi, deportasi adalah cara yang legal dari suatu negara dalam rangka penyerahan seorang, atau lebih, ini menyangkut dengan menifestasi dari kedaulatan suatu negara. Depotasai bisa dilakukan karena seperti orang tersebut terlibat dalam (sebagai pelaku) suatu kejahatan atau juga bisa karena orang tersebut sedang dimintakan untuk diekstradisi oleh negara lain, dan negara yang mendeportasi bukan sebagai negara-diminta⁸.

2) Pengusiran

Setiap negara berhak untuk mengusir orang asing dari seluruh atau sebagian wilayahnya dan hak ini sudah diketahui secara umum⁹. Hampir sama dengan pendeportasian terutama alasan pengusirannya, kalau dalam deportasi orang tersebut disuruh kembali ke negara dari mana dia datang, tapi dalam pengusiran, orang tersebut bisa menentukan kemana negara yang dikehendakinya. Pengusiran juga bisa dilakukan oleh pengadilan lantaran orang tersebut melakukan suatu kejahatan, setelah menjatuhkan hukum pengadilan juga bisa menyuruh orang itu untuk segera meninggalkan negara tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan¹⁰.

Pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara darimana dia semula datang. Sebagai contohnya adalah

⁷ *Ibid*, hlm 180

⁸ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

⁹ Oppenheim L, *International Law, Volume One*, Peace 8th, edition, 1960, hlm 691

¹⁰ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

pada bulan Desember 1979 Pemerintah Amerika Serikat telah mengusir Shah Iran beserta keluarganya dari wilayah Amerika Serikat, sebab kehadirannya di Amerika Serikat untuk berobat ternyata berekor dengan disanderanya sebanyak 52 orang diplomat AS di Teheran¹¹.

Prosedur pengusiran memang sangat mudah, oleh karena tidak ada kepentingan negara lain yang tersangkut, kecuali kepentingan orang/ individu yang diusir itu sendiri. Tindakan pengusiran sebenarnya berdasarkan supremasi teritorial suatu negara atas orang dan benda yang ada di dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu bagi individu yang diusir, tiada jalan lain kecuali tunduk pada perintah pengusiran tersebut¹².

Jika negara yang dituju ditentukan sendiri oleh negara yang mengusir, hal ini sudah melampaui batas dari tujuan pengusiran itu sendiri. Sebab dengan sudah diusirnya atau telah keluarnya orang yang bersangkutan sebenarnya tujuan pengusiran itu telah tercapai. Penentuan negara yang akan dituju bila ditentukan sendiri oleh negara yang mengusir, juga dipandang tidak adil.

Contoh kasus yang sangat terkenal dalam sejarah tentang pengusiran, di mana mengusir tersebut dipakai sebagai cara untuk mengembalikan orang yang diusir kepada negara yang sedang mencarinya adalah kasus Duke of Chateau Thierry tahun 1914. Dalam kasus ini, menteri dalam negeri Inggris berdasarkan *Aliens Restriction Act* 1914 dan *Aliens Restriction Order* 1916, mengeluarkan perintah pengusiran atas Duke of Chateau Thierry yang telah melarikan diri dari Perancis ke Inggris untuk menghindari kewajiban memasuki dinas

¹¹ I Wayan Parthiana, **Extradisi dalam hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 144, kasus penahanan sandera AS ini berlangsung selama 14 bulan dan baru berhasil diselesaikan pada tanggal 20 Januari 1981 setelah ,melalui perundingan yang berlarut larut.

¹² *Ibid*, hlm 144, pemerintah Austria, telah mengusir Antonio de Spinola bekas presiden portugas yang digulingkan oleh rezim sayap kiri, sebab selama diberi ijin untuk tinggal di Austria ternyata dia melakukan kegiatan- kegiatan politik. Uganda di bawah rezim Idi Amin, telah melakukan pengusiran secara besar- besaran terhadap orang – orang India dari Uganda berdasarkan alasan bahwa mereka telah mendominasi perekonomian Uganda.

militar pada waktu meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. Walaupun perintah pengusiran itu tidak menentukan secara khusus negara atau tempat yang dituju, tetapi oleh jaksa Agung Inggris diperbolehkan untuk membawa Chataeau Thierry ke sebuah kapa yang akan berlayar menuju Perancis¹³.

- 3) Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan¹⁴

Cara ini lazim digunakan oleh negara-negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dalam menanggulangi kejahatan transnsional maupun kejahatan konvensional yang bersifat lokal berdasarkan hubungan baik. Pelaku yang tertangkap di wilayah negara yang berbatasan langsung, diserahkan secara langsung di daerah perbatasan negara-negara tersebut.

- 4) Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan¹⁵

Walaupun kurang lazim dilaksanakan, pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Prosesnya, negara A bekerja sama dengan negara B untuk menangkap orang berada di negara B yang bukan negara B atau A, dan membawanya ke wilayah negara ketiga yang dirahasiakan. (Kasus Omar Al Farouk).

- 5) Penculikan¹⁶

Penculikan merupakan tindakan ilegal yang pernah terjadi, prosesnya seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara oleh

¹³ Greig, D.W, *International law*, Butterworths, London, 1970, hlm 338

¹⁴ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

¹⁵ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

¹⁶ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

negara penculik dibawa keluar secara paksa tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari negara dimana dia berada, dan dilakukan secara diam-diam. (kasus Adolf Eichmann)

- 6) Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada¹⁷

Tindakan ini di luar kebiasaan hukum internasional biasanya dilakukan oleh negara besar (kuat) kepada negara kecil (lemah). Prosesnya, orang yang berada di wilayah negara lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada diambil secara paksa dan dilakukan secara terang-terang (berbeda dengan penculikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang menurut kebiasaan-kebiasaan hukum internasional sangat bertentangan karena telah melanggar prinsip yang fundamental yakni kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara. (kasus Noriega)

Interpol

Interpol atau *International Police* (dalam bahasa Indonesia : Polisi Internasional) sebenarnya bukanlah merupakan sebuah badan yang melakukan tugas- tugas kepolisian, melainkan sebuah badan atau sebuah organisasi yang disebut “*international Criminal Police Organization*” (disingkat: ICPO. Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota – anggotanya terdiri dari badan – badan kepolisian dari berbagai negara¹⁸. Pada tahun 1956 tepatnya tanggal 13 Juni 1956 dalam sidangnya di Wina (austria) setelah diadakan perubahan Anggaran Dasar atau charternya badan ini resmi bernama *International Criminal Police Organization* (ICPO), yang sebelumnya bernama *International Criminal Police Commission*. Alamat kawatnya menggunakan : INTERPOL¹⁹.

¹⁷ Yudi Pratikno, **Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional**, <http://syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

¹⁸ I Wayan Parthiana, **Ekstradisi dalam hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 129

¹⁹ *Ibid*, hlm 129

Dalam perkembangannya selanjutnya, INTERPOL lebih populer dan lebih dikenal untuk sebutan badan yang bernama *International Criminal Police Organization* (ICPO) tersebut. ICPO atau Interpol ini bertujuan untuk²⁰:

1. Menjamin serta memajukan kerja sama seerat eratnya antara sesama lembaga – lembaga kepolisian negara – negara anggotanya, dalam batas – batas yurisdiksinya masing – masing berdasarkan semangat dan jiwa *Universal Declaration of Human Right*
2. Mendirikan serta mengembangkan semua badan yang akan secara efektif dapat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan semua kejahatan.

Untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tersebut serta menjamin kerja sama erat, setiap negara anggota harus membentuk atau menunjuk sebuah badan yang bertugas sebagai Biro Pusat Nasional Interpol untuk masing – masing negara, lazim disebut dengan sebutan : *National Central Bureau* (NCB) dengan nama dari negara tempat NCB tersebut²¹, seperti NCB Indonesia atau Interpol Indonesia. NCB negara negara ini, dalam batas – batas ruang lingkup tugas -tugasnya serta tugas INTERPOL (ICPO), haruslah menyelenggarakan hubungan – hubungan dengan berbagai instansi di dalam negeri masing – masing, instansi – instansi di negara negara lain yang bertugas sebagai NCB negara yang bersangkutan serta dengan Sekretaris Jenderal INTERPOL/ICPO (pasal 32,a,b,c, Charter Interpol)²².

Pentingnya Perjanjian Ekstradisi

Sebuah perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah sarana yang terpenting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Ketidak adaannya sebuah perjanjian Ekstradisi antar negara akan mempersulit proses pengembalian pelaku kejahatan ke negara peminta tersebut. Negara –

²⁰ *Ibid*, hlm 129

²¹ *Ibid*, hlm 130

²² *Ibid*, hlm 130

negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai sarana kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Ketiadaan dari Perjanjian Ekstradisi menjadi salah satu hambatan yang sangat besar untuk mengembalikan pelaku kejahatan, walaupun masih banyak lagi jalan yang bisa ditempuh supaya pelaku kejahatan tidak menjadikan wilayah negara lain sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan, seperti misalnya dengan memperkuat penjagaan keamanan di daerah perbatasan wilayah, melakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang – orang yang memasuki atau meninggalkan wilayahnya, ataupun dengan menggunakan upaya – upaya hukum seperti pengusiran dan deportasi yaitu dengan menyuruh ke luar orang – orang yang tidak dikehendaki kehadirannya di wilayah negara yang bersangkutan.

Ditegaskan disini, Kehadiran atau masuknya orang asing ke dalam wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu²³:

Kelompok yang pertama, adalah mereka yang benar – benar tidak mempunyai latar belakang yang tidak baik di negara asalnya atau di negara tempatnya semula²⁴. Kelompok kedua, adalah mereka yang berlatar belakang tidak baik, misalnya telah melakukan kejahatan di negara asalnya atau di negara lain²⁵.

Terhadap kelompok yang pertama, apabila dia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan negara dimana dia berada, misalnya melanggar hukum atau melanggar keamanan dan ketertiban negara yang bersangkutan sudah tentu terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukum, misalnya mengadilinya, atau menghukumnya, atau mempersilahkan kepadanya untuk meninggalkan wilayah negara itu. Dengan mempersilahkan orang itu untuk meninggalkan wilayah negara itu, atau

²³ Margaretta S R Silitonga, **Lembaga Ekstradisi sebagai sarana Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional**, Medan, 2007, hlm. 92

²⁴ I Wayan Parthiana, **Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 6

²⁵ *Ibid*, hlm 6

tegasnya, mengusir orang itu, maka selesailah persoalan dari negara tersebut terhadap orang itu. Sedangkan bagi orang yang diusir itu, adalah haknya untuk menentukan sendiri negara mana yang akan ditujunya. Dalam hal ini jelas, bahwa tidak ada menyangkut pautkan kepentingan dari negara lain.

Terhadap kelompok yang kedua, berbeda masalahnya dengan kelompok yang pertama ini, kehadiran orang itu di dalam wilayah suatu negara yang bukan negaranya adalah untuk menghindari tuntutan hukum dari negara di mana dia telah melakukan kejahatan. Jadi, dalam hal ini tersangkut kepentingan dari negara lain sebagai negara yang mempunyai yurisdiksi atas orang atau perbuatannya itu. Meskipun kehadiran orang semacam ini mungkin juga tidak dikehendaki oleh negara tersebut, misalnya karena kehadirannya itu dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan serupa, meskipun tindakan pengusiran terhadap orang tersebut juga dapat dilakukan, akan tetapi pengusiran sebagai tindakan sepihak ini mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan – kelemahan tersebut adalah²⁶:

1. Jika si pelaku kejahatan yang akan diusir itu akan mencari negara lain yang mungkin mau menerimanya dan kalau bisa untuk selama mungkin, untuk menghindari tuntutan hukum dari negara dimana dia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian dia akan tetap lolos dari tuntutan hukum sehingga rasa keadilan dari korban atau anggota keluarganya ataupun masyarakat negara itu, tetap belum dipulihkan. Hal ini jelas tidak dikehendaki oleh negara itu sendiri.
2. Tindakan pengusiran ini tidaklah membantu untuk mencegah dan memberantas kejahatan, sebab orang – orang pelarian semacam ini telah lolos dari pengadilan dan hukum negara tempatnya melakukan kejahatan. Bahkan dapat merangsang setiap pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke negara lain. Walaupun dia bisa dikenakan tindakan

²⁶ Margareta S R Silitonga, opcit, hlm. 93

pengusiran, dia akan tetap merasa aman memilih negara lain untuk mencari perlindungan.

3. Bagi si pelaku kejahatan itu sendiri, walaupun pengusiran mungkin (dalam batas – batas tertentu) lebih menguntungkan dirinya seperti dikemukakan diatas, tetapi jika negara tempatnya melarikan diri juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan yang telah dilakukannya itu berdasarkan hukum nasional negara itu, kemudian ternyata mengadili dan menghukumnya. Kemudian setelah dia selesai menjalani hukumannya, dia merasa dirinya aman kembali ke negara asalnya atau ke negara tempat kejahatan tersebut dilakukan dahulu (*locus delicti*). Tetapi ternyata negara *locus delicti* itu mengadili dan menghukumnya atas kejahatan yang dahulu telah dijatuhi hukuman oleh negara tersebut dahulu, juga berdasarkan hukum (pidana) nasional dari negara yang bersangkutan. Dengan kata lain negara yang belakangan ini tidak mau mengakui keputusan pengadilan negara terdahulu, atau menolak azas *ne bis in idem*²⁷. Jadi, jelaslah bahwa si pelaku kejahatan itu sendiri menderita resiko besar karena kejahatannya itu kemungkinan akan diadili lebih dari satu kali. Dia tidak bisa berlindung dibalik azas *ne bis in idem*, yang dalam ekstradisi sudah diterima sebagai salah satu azasnya.

Dengan menguraikan beberapa kelemahan dari pengusiran sebagai tindakan sepihak, maka sekarang tinggal alternatif yang paling mungkin dipilih, yaitu ekstradisi. Ekstradisi ini dapat meniadakan atau setidaknya tidaknya mengurangi kelemahan – kelemahan pengusiran sebagai tindakan sepihak seperti telah diuraikan diatas. Ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu. Dengan demikian sekaligus rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan.

²⁷ Asas “ne bis in idem” adalah suatu asas dimana seorang terdakwa tidak boleh dituntut kedua kalinya (*bis*) berdasarkan perkara yang sama (*idem*).

Persyaratan dari Singapura Untuk Mewujudkan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura

Antara pemerintah Indonesia dan Singapura memang pernah menandatangani nota kesepahaman tentang ekstradisi yang ditandatangani oleh masing-masing Menteri Luar Negeri yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampaksiring, Bali. Untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut agar dapat berlaku efektif diperlukan suatu persetujuan dengan parlemen negara masing-masing. Ratifikasi tersebut kemudian dilegalkan dalam bentuk suatu Undang-Undang. Tapi berhubung kedua negara belum meratifikasinya, maka perjanjian tersebut belum dapat berjalan efektif dan mengikat.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pemerintah RI tak mengupayakan perjanjian tersebut agar segera diratifikasi. Upaya pemerintah RI agar perjanjian ekstradisi segera diratifikasi sebenarnya sudah lama dilakukan. Namun, syarat yang diajukan Pemerintah Singapura dipandang sangat tidak masuk akal. Di samping perjanjian Ekstradisi, proses penandatanganan tersebut dilakukan tandem dengan perjanjian *Defense Coorporate Agreement* (DCA) oleh pihak Singapura, dan Singapura meminta suatu wilayah di Indonesia untuk dijadikan tempat pelatihan militer. Pemerintah RI jelas menolak mentah-mentah syarat tersebut, DPR juga tidak setuju.

Permintaan Singapura ini jelas tidak lazim dan melecehkan Indonesia. Sejumlah perjanjian ekstradisi yang dibuat Pemerintah RI dengan negara-negara lain di dunia tidak pernah ada yang mensyaratkan hal seperti itu.

Perbedaan Sistem Hukum Indonesia dan Singapura

Perbedaan perbedaan ini membuat Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pengadilan Singapura bisa membatalkan permohonan untuk

membawa koruptor keluar dari negaranya dengan alasan ketetapan putusan pengadilan. Dalam sistem Kontinental, undang-undang atau kodifikasi dijadikan sebagai hukum utama. Sedangkan dalam sistem *Anglo-Saxon*, preseden (putusan pengadilan sebelumnya) dan kebiasaan sebagai sumber hukum utama. Sistem *Anglo-Saxon* menempatkan pengadilan sebagai pihak yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diekstradisi²⁸.

Mengingat dalam sistem hukum *common law* proses ekstradisi harus melalui tahapan pemeriksaan di persidangan yang bukan tidak mungkin tidak selesai di satu tingkat pengadilan saja. Di Indonesia proses ekstradisi sejatinya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama karena hal tersebut merupakan bagian dari wewenang eksekutif, bukan yudikatif seperti di negara-negara *common law*. Sehingga, prosesnya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Pelaku Korupsi Indonesia yang melarikan diri ke Singapura sebenarnya memanfaatkan ketiadaan dari Perjanjian ekstradisi di antara Indonesia dan Singapura untuk melarikan diri dari Kejaran pihak berwajib Indonesia. Para pelaku tersebut mengetahui bahwa Singapura adalah pilihan untuk melarikan diri yang terbaik dikarenakan letak geografisnya yang sangat dekat dengan Indonesia, dan juga ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia membuat para pelaku tersebut dapat bersembunyi di Singapura dengan tenang. Karena ketiadaan perjanjian ekstradisi tersebut membuat pihak Indonesia walaupun sudah mengetahui para pelaku tersebut melarikan diri ke Singapura, Indonesia tidak dapat menangkap mereka begitu saja

²⁸Rahmat Sahid, **Ekstradisi; Perbedaan Sistem Hukum Bisa jadi Kendala**, http://rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada tanggal 27 July 2012

karena terbentur oleh yuridiksi dari Pemerintah Singapura karena berada di wilayah negaranya.

- B. Penggunaan mekanisme – mekanisme lain selain menggunakan perjanjian ekstradisi memang dapat digunakan, akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu pengembalian pelaku koruptor dan juga beserta aset-asetnya sangat sulit untuk didapatkan karena jika hanya menggunakan MLA, dan juga ekstradisi terselubung yang hanya berpedoman pada asas timbal balik antara ke dua belah Negara, kemungkinan maksimal yang hanya bisa didapatkan hanyalah pengembalian pelaku korupsi itu saja, sedangkan untuk pengembalian aset-aset pelaku tersebut ke Indonesia harus melalui prosedur yang legal dan berdasarkan perjanjian dari kedua belah Negara.

SARAN

- A. Untuk dapat mengembalikan pelaku korupsi Indonesia yang melarikan diri ke Singapura dengan mudah hanya dengan menggunakan perjanjian ekstradisi.. Hal ini disebabkan karena ekstradisi memungkinkan prosedur yang lebih efisien karena bisa langsung dilakukan penyerahan tersangka lewat kedutaan masing-masing negara tanpa harus melalui prosedur lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional atau Interpol. Oleh karena itu, pihak Indonesia tetap harus berusaha keras dan menekan agar perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dapat diadakan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- B. Untuk saat ini, tanpa adanya perjanjian ekstradisi memang ada mekanisme lainnya untuk menangkap para pelaku koruptor tersebut, walaupun memiliki cara yang sedikit rumit. Pemerintah Indonesia harus tetap berupaya keras agar para pelaku tersebut dapat dikembalikan lagi ke Indonesia dan harus memprioritaskan organisasi organisasi Internasional anti Korupsi agar ke depannya

tidak ada lagi pelaku korupsi yang melarikan diri, dan mengalami kendala dalam pengembaliannya.

Daftar pustaka

Greig, D.W, *International law*, Butterworths, London, 1970

I Wayan Parthiana, **Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1990.

I Wayan Parthiana, **hukum pidana Internasional dan ekstradisi**, yrama widya, bandung 2003

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta 2005

Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

INTERNET

Agustinus Supriyanto, *Peaces of Justice (Keadilan Dalam Genggaman)*, <http://lawtherapy.blogspot.com/2010/01/beberapa-asas-pokok-ekstradisi-oleh.html>, diakses pada tanggal 13 April 2012

Basidrihowan, **Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura**, <http://basidridhowan.blogspot.com/2011/11/jogja-bercahaya.html>, diakses pada tanggal 17 July 2012

Billy Gustama, **Asas Asas Hukum Internasional**, <http://billygustama.blogspot.com/2010/08/asas-asas-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 10 April 2012

Cifor, **Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, www.cifor.cgiar.org/ilea, diakses pada tanggal 26 July 2012

Eriyanto, **Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Eropa Kontinental**, <http://eriyantowp.blogspot.com/2012/03/makalah-sistem-hukum-indonesia.html>, diakses pada tanggal 27 July 2012

Galih Perdana Putra, **Perjanjian Ekstradiksi Singapura - Indonesia**, <http://geauns.multiply.com/journal/item/5>, diakses pada tanggal 5 April 2012

Kucinx, **Skripsi Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**, <http://contohmakalah-contohskripsi.blogspot.com/2011/02/skripsi-perjanjian-ekstradisi-dalam.html>, diakses pada tanggal 1 April 2012

Mekar sinurat, **Perbandingan Ekstradisi dan MLA**, <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses pada tanggal 26 July 2012.

Rahmat Sahid, **Ekstradisi; Perbedaan Sistem Hukum Bisa jadi Kendala**, http://rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada tanggal 27 July 2012

Rigo Risto, **Extradisi**, <http://rigoristo.blogspot.com/2011/02/ekstradisi.html>, diakses pada tanggal 5 April 2012

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional